

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 ini dapat diselesaikan.

Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2026 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2026, untuk menjalankan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dokumen Rancangan Akhir Renja ini memuat tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong beserta indikatornya, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Rancangan Akhir Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.

Kami menyadari bahwa Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon koreksi, saran dan masukan dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong ini dapat bermanfaat dan diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung September 2025

Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong



Diyanto, SE, MT, FRMP
Pembina Tk.1/IV-b
NIP. 197110132005011005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum..... I-3

1.3 Maksud dan tujuan..... I-6

1.4 Sistematika penulisan I-7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT..... II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Inspektorat II-1

2.2 Analisis Kinerja pelayanan SKPD..... II-11

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Inspektorat..... II-16

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II-23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
TABALONG..... III-1

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat III-1

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH... IV-1

BAB V PENUTUP V-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

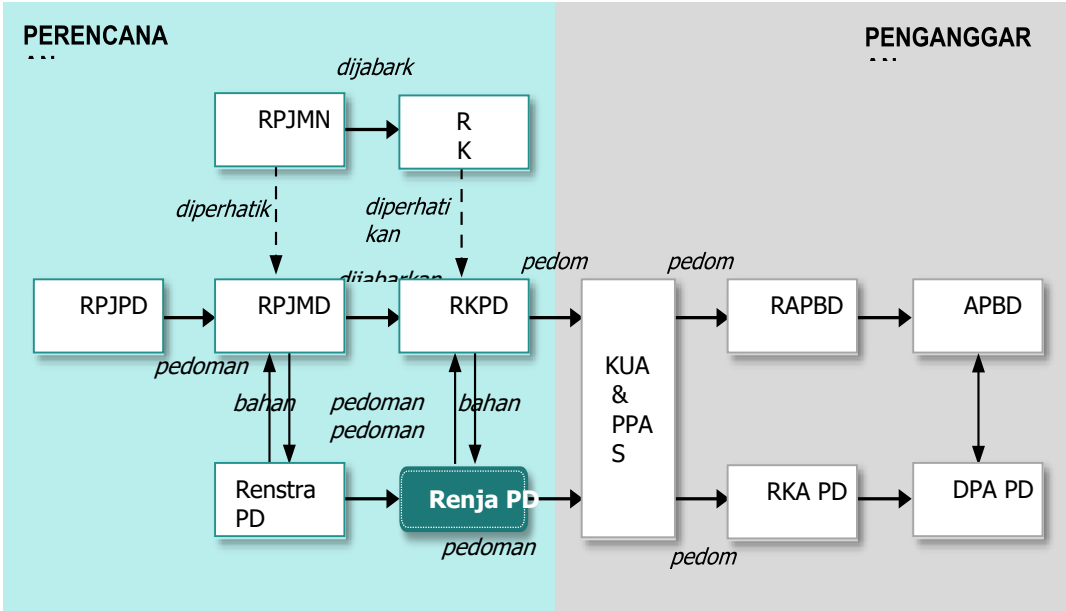
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan konsekuensi dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai wujud implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2027.

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mulai diberlakukan tanggal 23 Juni 2023, maka dokumen Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong untuk Tahun 2027 menerapkan dan memutakhirkan kodefikasi dan nomenklatur sesuai Keputusan ini. Kodefikasi dan Nomenklatur Program / Kegiatan dan Belanja Daerah dalam Kepmendagri ini merupakan acuan bagi Inspektorat Daerah dalam melakukan sinkronisasi tatakelola penyelenggaraan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD”. Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi bahan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah”

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyempurnakan Penyusunan Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2026. Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Inspektorat Daerah , evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Inspektorat Daerah , termasuk Evaluasi terhadap capaian output Renja



Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan perencanaan kinerja. Selanjutnya, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2027 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan(Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-



- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan



- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 459);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3)



19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47).
22. Peraturan Bupati nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Awal Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)



sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Inspektorat Daerah
- 2.4 Riview Terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

IV Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah

BAB V Penutup



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berikutnya (tahun 2026) dengan mengacu pada APBD tahun berjalan, sesuai dengan perencanaan strategis periode 2025-2029.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja untuk Tahun 2024 ditunjukkan sebagaimana Tabel 2.1,



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2025

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan /Sub Kegiatan 2024			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6/4)*100	(8)	(9)	(10)=(9/4)*100	(11)
6	PENGAWASAN									
6.01	INSPEKTORAT DAERAH									
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	B	B	100%				
		Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	81%				80%	80%	100 %	
6.01.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	4 Dok	100%	
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Lap	6 Lap	6 Lap	100%	6 Lap	6 Lap	100%	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Org	45 Org	45 Org	100%	55 org	55 org	100%	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi.	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



**RANCANGAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2027**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan /Sub Kegiatan 2024			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6/4)*100	(8)	(9)	(10)=(9/4)*100	(11)
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	59 org	45 org	30 org	66%	55 org	55 org	100%	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase aktivitas administrasi umum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	100%	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barag Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9 Paket	9 Paket	9 Paket	100%	9 Paket	9 Paket	100%	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5 Dok	5 Dok	5 Dok	100%	5 Dok	5 Dok	100%	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375 Lap	250 Lap	250 Lap	100%	260 Lap	260 Lap	100%	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100%	-	-	-	-	-	100%	Sub Kegiatan baru Tahun 2026
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47 unit	-	-	-	-	-		Sub Kegiatan baru Tahun 2026
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									



**RANCANGAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2027**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan /Sub Kegiatan 2024			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6/4)*100	(8)	(9)	(10)=(9/4)*100	(11)
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	8 Lap	8 Lap	8 Lap	100%	8 Lap	8 Lap	100%	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	100%	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	100%	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	30 Unit	24 Unit	80%	37 Unit	37 Unit	100%	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	93 unit	-	-	-	-	-		Sub Kegiatan baru Tahun 2026
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									
	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Penurunan Rekomendasi LHP Inspektorat Daerah		91%	91%	100%				
		Persentase PKPT yang terlaksana sesuai	85%				84%	84%	100%	



**RANCANGAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2027**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan /Sub Kegiatan 2024			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6/4)*100	(8)	(9)	(10)=(9/4)*100	(11)
		dengan rencana dan tepat waktu								
		Temuan Auditor Eksternal yang ditindaklanjuti (%)	89%				80,00%	80,00%	100%	
		Temuan Auditor Internal yang ditindaklanjuti (%)	86%				80,00%	80,00%	100%	
		Persentase Perangkat Daerah dengan Rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu keuangan yang ditindaklanjuti	60,00%				55,00%	55,00%	100%	
		Persentase Perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen resiko sesuai ketentuan	80%				75%	75%	100%	
		Persentase Rekomendasi hasil Evaluasi Internal AKIP yang ditindaklanjuti	100%				100%	100%	100%	
		Persentase Reviu Lkj Pemda dan dokumen perencanaan	100%				100%	100%	100%	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal									
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah dan Pemdes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									
	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yg dilaksanakan	119 Lap	119 Lap	119 Lap	100%	119 Lap	119 Lap	100%	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja									
	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja yang dilakukan	7 Lap	7 Lap	7 Lap	100%	7 Lap	7 Lap	100%	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan									
	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5 Lap	5 Lap	5 Lap	100%	5 Lap	5 Lap	100%	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa									
	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang dilaksanakan	15 Lap	3 Lap	3 Lap	100%	11 Lap	11 Lap	100%	
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal									
	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Kerja Sama Pengawasan Internal yang terbentuk	5 Kspt	2 Kspt	1 Kspt	50%	2 Kspt	2 Kspt	100%	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK									



**RANCANGAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2027**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan /Sub Kegiatan 2024			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6/4)*100	(8)	(9)	(10)=(9/4)*100	(11)
	RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP									
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	55 Dok	20 Dok	20 Dok	100%	55 Dok	55 Dok	100%	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan ttujuan tertentu yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.01.02.2.02.0001	Penangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah									
	Terlaksananya Penangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100%	2 Lap	2 Lap	100%	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	9 Lap	9 Lap	9 Lap	100%	9 Lap	9 Lap	100%	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI									
	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan Asistensi	Indeks Kapabilitas APIP		3.00	3.00	100%				
		Jumlah Perangkat Daerah yang berhasil di usul ke penilaian ZI Nasional	2 PD				1 PD	1 PD	100%	
		Nilai MCSP	96				95,5	95,5	100%	
		Persentase capaian dan ketepatan waktu pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN	100%				100%	100%	100%	
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%				95,50%	95,50%	100%	
		Persentase survey kepuasan layanan pendampingan dan QA	80%				80%	80%	100%	
		Persentase perumusan kebijakan Teknis dan Fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan	100%				100%	100%	100%	
		Persentase APIP yang memiliki sertifikasi sesuai ketentuan/kebutuhan	100%				100%	100%	100%	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan									
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang	60%	50%	50%	100%	55%	55%	100%	



**RANCANGAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2027**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan /Sub Kegiatan 2024			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6/4)*100	(8)	(9)	(10)=(9/4)*100	(11)
		dilaksanakan								
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan									
	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	10	-	-	-	7	7	100%	Sub Keg ini pd Tahun 2024 tidak ada
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan									
	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	4	-	-	-	3	3	100%	Sub Keg ini pd Tahun 2024 tidak ada
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi									
	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
	TerlaksananyaPendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang dilalukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	41 PD	41 PD	41 PD	100%	41 PD	41 PD	100%	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									
	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10 Keg	8 Keg	8 Keg	100%	8 Keg	8 Keg	100%	
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	41 PD	41 PD	41 PD	100%	41 PD	41 PD	100%	

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Tabalong, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu yang ditunjukkan dalam tabel 2.1, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 ada Beberapa Target Kinerja Program yang tidak tercapai yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat beberapa kegiatan penunjang yang realisasi anggarannya masih tergolong rendah, yaitu di bawah 70%. Antara lain :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan ini, capaian realisasinya sebesar 52,2% dari pagu anggaran Rp. 11.797.500,- dengan realisasi Rp. 6.156.300,-. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan adanya belanja perjalanan dinas yang tidak terealisasi dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada sub kegiatan ini, capaian realisasinya sebesar 64,7% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.821.875.000,- dengan realisasi Rp. 1.179.455.018,-. Rendahnya serapan anggaran dikarenakan pelaksanaan APBDP 2024 yaitu pada bulan Oktober, dengan waktu yang singkat dan banyaknya kegiatan tambahan pada APBDP 2024 di Sekretariat dan Irban-Irban, mengakibatkan beberapa orang yang semula direncanakan ikut Diklat, Pelatihan dan Bimtek, tidak dapat mengikutinya.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Realisasi Sub kegiatan ini Rp. 24.708.500,- atau sebesar 53.5% dari Anggaran yang tersedia Rp. 46.183.406,- dikarenakan pembelian sudah di laksanakan dan sesuai dengan peruntukannya rendahnya serapan anggaran ini dikarenakan tidak semua volume barang cetak yang digunakan.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

Pada sub kegiatan ini, capaian realisasinya sebesar 55,1% dari pagu anggaran Rp. 1.230.503.000,- dengan realisasi Rp. 678.325.082,-. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan adanya belanja perjalanan dinas yang tidak terealisasi dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pada sub kegiatan ini, capaian realisasinya sebesar 53,6%, dari pagu anggaran Rp. 217.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 116.623.638,-. Rendahnya serapan dana disebabkan karena sebagian besar kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong masih dalam kondisi baru, jadi masih ada service gratis dari dealer nya dan Sebagian masih belum memerlukan service yang besar.

Rendahnya realisasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan kegiatan, efisiensi penggunaan anggaran, serta terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan secara optimal pada tahun berjalan. Kondisi ini menyebabkan sebagian anggaran yang telah dialokasikan pada kegiatan penunjang belum dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut, pada tahun berikutnya akan dilakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan penunjang agar lebih menyesuaikan dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan. Selain itu, akan dilakukan peningkatan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala, sehingga kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Dengan langkah tersebut diharapkan pelaksanaan kegiatan penunjang pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal dan realisasi anggaran dapat meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Pada program penyelenggaraan pengawasan ini terdapat 2 kegiatan dan 8 Sub Kegiatan, yang rata-rata realisasinya masih sangat rendah dibawah 60% dan ada 1 Sub Kegiatan yang realisasi keuangan 0.00%, realisasi dari sub kegiatan ini disebabkan tidak terealisasi nya belanja pengawasan yang dikarena Surat Keputusan (SK) tentang Nominal biaya pengawasannya tidak terbit sehingga banyak anggaran belanja pengawasan tidak dapat direalisasikan.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi ini terdapat 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, yang rata-rata realisasinya juga hampir sama dengan Program Pengawasan, yang realisasi anggrannya masih dibawah 70%. Rendahnya realisasi dari sub kegiatan ini disebabkan tidak terealisasi nya belanja pengawasan yang dikarena Surat Keputusan (SK) tentang Nominal biaya pengawasannya tidak terbit sehingga banyak anggaran belanja pengawasan tidak dapat direalisasikan.

Upaya untuk tindak lanjut atas rendahnya realisasi pada Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada tahun berikutnya akan dilakukan langkah-langkah perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah mempercepat proses penyusunan dan penetapan Surat Keputusan (SK) tentang nominal biaya pengawasan, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan dapat berjalan tepat waktu dan anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan secara optimal.

Selain itu, Inspektorat Daerah juga akan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses penganggaran dan administrasi pelaksanaan kegiatan, serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan. Dengan langkah tersebut diharapkan pada tahun berikutnya realisasi keuangan maupun kinerja pada Program Penyelenggaraan Pengawasan dapat meningkat dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara lebih optimal.

Walau Kegiatan yang dilaksanakan ada yang tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah direncanakan dalam Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 kan tetapi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong tetap optimis dan

diperkirakan akan terealisasi sepenuhnya untuk target kinerja pada tahun berikutnya. Aktivitas-aktivitas kegiatan dilaksanakan dengan lancar untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, dengan demikian target kinerja tetap dapat dipenuhi sesuai dengan yang diharapkan.

Dari sisi anggaran, realisasi anggaran yang dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 15.160.974.659,- dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 18.610.213.575,- yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun 2024. Dengan demikian persentase realisasi anggaran pada tahun 2024 ini adalah sebesar 81,5 %.

Evaluasi pelaksanaan Ranwal Renja Inspektorat Daerah tahun 2024 dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan IV dengan mengacu pada APBD tahun berjalan, Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kinerja, baik dari sisi fisik maupun keuangan, serta untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam mengidentifikasi hambatan, permasalahan, dan faktor pendukung pelaksanaan kegiatan, sekaligus sebagai bahan perumusan rekomendasi perbaikan dalam penyusunan Renja tahun berikutnya agar lebih terarah, akuntabel, dan selaras dengan target kinerja Inspektorat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah yang terdiri dari Sekretariat, 3 Inspektur Pembantu dan 1 Inspektur pembantu khusus, telah menjalankan fungsi fasilitasi Pengawasan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Tabalong.

Fungsi Inspektorat Daerah tercermin dari pelaksanaan pengawasan intern melalui kegiatan reviu, evaluasi, dan pendampingan terhadap proses perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, keterpaduan perencanaan, efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Hal-hal penting yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dalam menjalankan fungsinya adalah :Pelaksanaan pengawasan intern melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.



1. Pemberian assurance atas kepatuhan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta kinerja perangkat daerah.
2. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi kepada perangkat daerah dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan manajemen risiko.
3. Reviu atas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan internal maupun rekomendasi aparat pengawasan eksternal.
5. Pembinaan dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui pengembangan kompetensi dan penguatan sistem pengendalian intern.
6. Pelaksanaan pengawasan berbasis risiko sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kepatuhan tindak lanjut - Eksternal - Internal	Persentase Tindak Lanjut - Eksternal - Internal			80% 85%	80% 85%	85% 88%	92% 92%	98% 98%	78% 78%	70% 90%	78,7% 90%	83% 92%	86,8% 91%	87% 77%	87% 80%	93% 82%	90% 90%	88% 92%
2	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Tabalong	Persentase maturitas SPIP level 3			50%	50%	60%	70%	80%	0%	0%	48%	52%	76%	0%	0%	80%	74%	95%
3	Meningkatnya akurabilitas kinerja entitas	Persentase laporan kinerja dan keuangan intitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan per UUn			BB	100%	100%	100%	100%	BB	100%	100%	100%	100%	BB	100%	100%	100%	100%
4	Mewujudkan Zona Integritas dgn Predikat WBK	Jlh PD yg diusulkan sbg ZI (WBK0			3	3	3	3	5	0	5	1	1	1	0	1	3	3	2
5	Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	IKU/SPM/NSPK/IKK/SDGs	Target Renstra Inspektorat Tahun						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	6		7	8	9		10	11	12	13	
1	Persentase Penurunan Temuan berulang Eksternal	IKU	50%	45%	35%	30%	25%	25%					
2.	Persentase Perangkat Daerah yang pengendalian Internalnya berkategori MEMADAI /Level 3	IKU	75%	80%	85%	95%	100%	100%					
3.	Persentase Perangkat Daerah berkategori SAKIP Minimal A	IKU	20%	40%	50%	60%	70%	70%					
4.	Nilai IEPK	IKU	2,84	2,88	2,92	2,96	3,00	3,00					
5.	Perangkat Daerah yang berhasil mendapat	IKU	2	2	3	3	4	4					



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

NO	INDIKATOR KINERJA	IKU/SPM/NSPK/IKK/SDGs	Target Renstra Inspektorat Tahun						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	6		7	8	9		10	11	12	13	
	Predikat WBK/WBBM												
6.	Indeks Kapabilitas APIP	-IKU	3,20	3,30	3,40	3,60	3,70	3,70					
7.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	IKK	3,100	3,125	3,150	3,175	3,200	3,225					
8.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	IKK	3.20	3.30	3.40	3.60	3.70	3.70					
9.	Manajemen Resiko Indeks	IKK	2,90	3	3,1	3,2	3,3	3,4					
10.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	IKK	87	87,5	88	88,5	89	90					

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Tabalong, 2025

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Seiring dengan meningkatnya tuntutan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, begitu cepatnya perubahan dan perkembangan regulasi terkait pelayanan masyarakat dan luasnya cakupan tugas-tugas Inspektorat Daerah dalam proses pengawasan, maka diperlukan upaya peningkatan secara terus menerus terhadap kompetensi pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Daerah sekaligus penataan kembali Struktur dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong. Hal itu semata-mata untuk menjawab tantangan dan kompleksitas isu pembangunan yang terus tumbuh dan berkembang begitu cepat dewasa ini dan dimasa depan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (IRB) dan tata kelola pemerintahan serta pencegahan korupsi.
2. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik dan bersih.
3. Peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)-Terintegrasi.
4. Masih rendahnya capaian Manajemen Risk Index (MRI), hal ini masih karena belum adanya monitoring proses manajemen risiko secara menyeluruh beserta pelaksanaan RTP dan efektivitasnya pada masing-masing UPR.
5. Masih belum optimalnya nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), hal ini karena perangkat daerah masih belum mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko terkait kemitraan dan *fraud* di tingkat operasional OPD sebagai upaya pencegahan dan pengendalian kecurangan *fraud*.
6. Fokus pemeriksaan diarahkan untuk menilai kinerja obyek pemeriksaan (auditan), namun dalam pelaksanaannya cenderung

terhadap aspek ketaatan, sehingga belum dapat menilai hasil (*outcome*) yang ingin dicapai oleh unit organisasi/SKPD.

7. Jumlah penanganan kasus pengaduan masyarakat dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang signifikan terutama terkait adanya pengaduan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa (ADD);
8. Kesadaran obrik dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan lembaga APIP dan BPK masih belum optimal terutama menyangkut pengembalian keuangan negara/daerah.
9. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia Inspektorat daerah, dimana masih belum memenuhi perhitungan analisis kebutuhan SDM dan beban kerja.
10. Jumlah dan komposisi aparaturnya antara JF Auditor dan JF PPUPD belum berimbang.
11. Perencanaan pengembangan SDM belum terpetakan secara baik dan terarah.
12. Sarana dan sarana penunjang kegiatan operasional pengawasan masih sangat terbatas terutama Kendaraan Dinas, Laptop, Tablet Android untuk Aplikasi Pengawasan dan Pembinaan APIP.

Adapun isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong mencakup beberapa hal sebagai berikut :

a. I s u

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi daerah “Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)” salah satu misi daerah untuk mencapai visi tersebut yaitu “Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera”, ditemui beberapa isu yang berkembang dibidang perencanaan pembangunan dalam periode mendatang yakni :

1. Kualitas Hidup Masyarakat Tabalong
2. Stabilitas Ekonomi, Sosial dan Budaya

3. Akses masyarakat terhadap Kebutuhan Dasar, Layanan Publik, dan Peluang Pengembangan Diri.

b. Permasalahan

Tugas Struktural dan Fungsional yang ada pada Inspektorat Daerah adalah tugas yang selalu melekat disegenap jajaran Inspektorat Daerah yaitu untuk menyelenggarakan Fungsi Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut sering dihadapkan pada beberapa permasalahan yang sering terjadi. Permasalahan dimaksud yaitu :

1. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah masih berorientasi pada keluaran (Output) dan belum berorientasi pada hasil (outcome) maupun dampak (Impact) sehingga Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Tabalong masih perlu di tingkatkan
2. Opini atas laporan keuangan oleh pengawas eksternal (BPK – RI) sangat penting karena sebagai salah satu tolak ukur transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu di pertahankan dan di tingkatkan lagi dalam penata usahaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong
3. Penerapan dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) khususnya dilingkungan Perangkat Daerah di Kabupaten Tabalong masih harus di tingkatkan hal ini di karenakan belum seluruhnya perangkat Daerah membuat SOP/Sisdur, SPM, Pengendalian Resiko dan sebagainya terutama terkait memberikan pelayanan kepada Masyarakat.
4. Masih tinggi/banyaknya temuan pemeriksaan baik oleh pengawas eksternal maupun internal dan kesadaran obrik dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan external dan internal masih belum optimal
5. Komitmen kepada SKPD dalam Upaya Pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM masih perlu di tingkatkan

6. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia aparaturnya pengawasan, dimana masih belum memenuhi perhitungan analisis kebutuhan SDM dan Beban Kerja. Total kebutuhan / kekurangan aparaturnya dilingkungan Inspektorat Kabupaten Tabalong sebanyak JFA 50 dan P2UPD 31
7. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional pengawasan masih sangat terbatas terutama bangunan gedung dengan ruangan yang terbatas dan kurang representatif, mobilitas sarana pengawasan (kendaraan roda 4 dan roda 2), meubeler, laptop, dan tablet/tab untuk Aplikasi Pengawasan.
8. Adanya kebijakan pengawasan yang sering berubah sehingga memerlukan penyesuaian kompetensi APIP.
9. Masih rendahnya kepatuhan dan pemahaman Pemerintah Desa terhadap pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan BUMDES.
10. Banyaknya pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan yang memerlukan tindak lanjut.
11. Kurangnya pemahaman Aparatur Daerah dan Desa terhadap tindak pidana korupsi..

Adapun Tantangan dan peluang bagi pengembangan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dalam satu tahun kedepan adalah :

Tantangan

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibandingkan dengan luasnya objek dan kompleksitas pengawasan.
2. Meningkatnya tuntutan kualitas pengawasan yang bersifat preventif, berbasis risiko, dan memberikan nilai tambah bagi perangkat daerah.
3. Dinamika regulasi dan kebijakan nasional di bidang pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi yang memerlukan penyesuaian cepat dalam pelaksanaan pengawasan.

4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan intern secara terintegrasi.
5. Masih perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman perangkat daerah terhadap pentingnya pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Peluang

1. Dukungan kebijakan nasional terhadap penguatan peran APIP, khususnya dalam peningkatan kapabilitas APIP dan penerapan pengawasan berbasis risiko.
2. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Reformasi Birokrasi yang semakin mendorong peran strategis Inspektorat sebagai assurance dan consulting partner.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pengawasan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan.
4. Meningkatnya kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya pengawasan intern dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Terbukanya peluang sinergi dan kolaborasi dengan aparat pengawasan eksternal dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan.

Dengan terpilihnya Kepala Daerah baru diharapkan berdampak di berbagai sektor maka Rumusan tematik Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2026 adalah ” **Pertumbuhan Ekonomi Yang Tangguh, Berdaya Saing Dan Inklusif Untuk Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat.** ”

Fokus Pembangunan adalah :

1. Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam bekerja dan berusaha



2. Peningkatan sumber daya manusia, kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengangguran.
3. Infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah
4. Pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan
5. Tata kelola lingkungan hidup

Dengan Tujuh Prioritas Daerah (PD) Kabupaten Tabalong Tahun 2026 yaitu :

1. Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dan berusaha;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau;
3. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, religius dan berkarakter;
4. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang tangguh, berdaya saing dan inklusif;
5. Optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar serta konektivitas akses informasi;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimaslisasi Reformasi Birokrasi;
7. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana.

Sebagai langkah awal kepemimpinan, Bupati terpilih secara resmi meluncurkan 7 Program Prioritas Pembangunan Daerah yang akan menjadi arah kebijakan strategis dalam lima tahun ke depan. Program-program ini disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi.

Peluncuran program prioritas ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Seluruh Perangkat Daerah diharapkan menjadikan

program prioritas tersebut sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan dan kegiatan, guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal bagi Masyarakat.

Adapun 7 program Prioritas Bupati untuk 5 tahun kedepan yaitu :

1. Satu desa satu wifi gratis
2. Satu desa satu Dai
3. Tabalong pasti sehat
4. 15.000 tenaga terampil
5. 1000 beasiswa sarjana
6. Jalan dan jembatan mantap
7. Kredit modal untuk UMKM dan petani

Rancangan program prioritas pada RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2026 menitikberatkan pada **isu aktual** seperti **kemiskinan, Kesehatan, pengangguran, daya saing daerah, tatakelola pemerintahan/ reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemenuhan infrastruktur dasar** mendukung IKN dan **tatakelola lingkungan hidup**.

Dengan arah kebijakan :

- Meningkatnya keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, akses lapangan kerja, menguatnya UMKM dan ekonomi lokal serta perlindungan, kolaborasi dan inklusi sosial;
- Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses layanan kesehatan, terjangkau, promosi pencegahan serta memperkuat layanan kesehatan berbasis digital;
- Meningkatnya akses, kualitas dan pemerataan pendidikan formal dan informal yang inovatif serta memperkuat pengembangan karakter dan nilai-nilai religius;

- Meningkatnya diversifikasi dan infrastruktur ekonomi untuk mendorong daya saing, inklusifitas serta memperkuat inovasi dan teknologi;
- Meningkatnya pemenuhan layanan infrastruktur dasar, konektivitas digital dan akses informasi dengan mengoptimalkan pembangunan berbasis wilayah, kolaborasi dan kemitraan serta memperkuat monitoring dan evaluasi proyek infrastruktur;
- Meningkatnya digitalisasi pelayanan publik, memperkuat reformasi sistem birokrasi, pengembangan kompetensi aparatur, transparansi dan partisipasi publik serta memperkuat pengawasan untuk menjaga konsistensi pencapaian kinerja; dan
- Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penguatan mitigasi bencana.

2.4 Review Terhadap APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Bab I ayat 1 disebutkan bahwa Anggaran Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pada APBD terdapat 3 program dan 19 kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Program dan kegiatan dimaksud tergambar dalam Tabel 2.3 di bawah ini.



Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Kabupaten Tabalong

Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INSPEKTORAT				24.936.604.774					26.581.874.700	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tabalong	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	81%	21.534.725.300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tabalong	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	81%	23.179.995.226	
Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tabalong	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	43.726.058	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tabalong	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	43.726.058	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tabalong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	20.254.058	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tabalong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	20.254.058	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tabalong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	6 Lap	23.472.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tabalong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Lap	23.472.000	



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tabalong	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	14.243.030.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tabalong	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	14.243.030.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tabalong	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Org	14.243.030.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tabalong	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Org	14.243.030.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tabalong	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	4.806.534.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tabalong	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	5.306.534.000	Penambahan Personil APIP dan Pembentukan Karer APIP
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tabalong	Jumlah Orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45 org	4.806.534.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tabalong	Jumlah Orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	59 org	5.306.534.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tabalong	Persentase aktivitas administrasi umum yang difasilitasi	100%	1.342.726.937	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tabalong	Persentase aktivitas administrasi umum yang difasilitasi	100%	1.342.726.937	



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tabalong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	9.280.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tabalong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	9.280.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tabalong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	91.574.943	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tabalong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	91.574.943	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tabalong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9 Paket	68.469.994	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tabalong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9 Paket	68.469.994	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tabalong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5 Dok	9.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tabalong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5 Dok	9.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tabalong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375 Lap	1.164.402.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tabalong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375 Lap	1.164.402.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tabalong	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Tabalong	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang	100%	1.006.269.926	Pemenuhan sarana dan pra



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemerintah Daerah		yang dilaksanakan			Daerah		dilaksanakan			sarana kantor
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tabalong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tabalong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47 unit	1.006.269.926	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tabalong	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	700.216.460	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tabalong	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	739.216.460	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tabalong	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	8 Lap	8.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tabalong	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	8 Lap	8.500.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tabalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Lap	62.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tabalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Lap	101.800.000	Penambahan Kenaikan Tagihan Listrik, Internet, Air
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tabalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Lap	628.916.460	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tabalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Lap	628.916.460	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tabalong	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	398.491.845	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tabalong	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	498.491.845	



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tabalong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	256.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tabalong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	356.200.000	Penambahan unit yg harus dijaga pemeliharaannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tabalong	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	93 unit	63.330.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tabalong	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	93 unit	63.330.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tabalong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	78.961.845	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tabalong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	78.961.845	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tabalong	Persentase PKPT yang terlaksana sesuai dengan rencana dan tepat waktu	84%	2.272.232.964	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tabalong	Persentase PKPT yang terlaksana sesuai dengan rencana dan tepat waktu	84%	2.272.232.964	
		Temuan Auditor Eksternal yang ditindaklanjuti (%)	80,00%				Temuan Auditor Eksternal yang ditindaklanjuti (%)	80,00%		
		Temuan Auditor Internal yang ditindaklanjuti (%)	80,00%				Temuan Auditor Internal yang ditindaklanjuti (%)	80,00%		
		Persentase Perangkat Daerah dengan Rekomendasi hasil	55,00%				Persentase Perangkat Daerah dengan Rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu keuangan	55,00%		



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		audit/evaluasi/reviu keuangan yang ditindaklanjuti					yang ditindaklanjuti			
		Persentase Perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen resiko sesuai ketentuan	75%				Persentase Perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen resiko sesuai ketentuan	75%		
		Persentase Rekomendasi hasil Evaluasi Internal AKIP yang ditindaklanjuti	100%				Persentase Rekomendasi hasil Evaluasi Internal AKIP yang ditindaklanjuti	100%		
		Persentase Reviu Lkj Pemda dan dokumen perencanaan	100%				Persentase Reviu Lkj Pemda dan dokumen perencanaan	100%		
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tabalong	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah dan Pemdes	100%	1.993.197.964	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tabalong	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah dan Pemdes	100%	1.993.197.964	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tabalong	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yg dilaksanakan	119 Lap	571.181.219	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tabalong	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yg dilaksanakan	119 Lap	571.181.219	
Reviu Laporan Kinerja	Tabalong	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja yang dilakukan	7 Lap	210.095.776	Reviu Laporan Kinerja	Tabalong	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja yang dilakukan	7 Lap	210.095.776	
Reviu Laporan Keuangan	Tabalong	Jumlah Laporan Hasil	5 Lap		Reviu Laporan Keuangan	Tabalong	Jumlah Laporan Hasil Reviu	5 Lap		



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Reviu Laporan Keuangan		348.513.000			Laporan Keuangan		348.513.000	
Pengawasan Desa	Tabalong	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang dilaksanakan	15 Lap	401.790.000	Pengawasan Desa	Tabalong	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang dilaksanakan	15 Lap	401.790.000	
Kerja Sama Pengawasan Internal	Tabalong	Jumlah Kesepakatan Kerja Sama Pengawasan Internal yang terbentuk	5 kesepakatan	102.850.000	Kerja Sama Pengawasan Internal	Tabalong	Jumlah Kesepakatan Kerja Sama Pengawasan Internal yang terbentuk	5 kesepakatan	102.850.000	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Tabalong	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	55 Dok	358.767.969	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Tabalong	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	55 Dok	358.767.969	
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tabalong	Persentase Pengawasan ttujuan tertentu yang ditindaklanjuti	100%	279.035.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tabalong	Persentase Pengawasan ttujuan tertentu yang ditindaklanjuti	100%	279.035.000	
Penangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tabalong	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	2 Lap	82.750.000	Penangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tabalong	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	2 Lap	82.750.000	



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tabalong	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	9 Lap	196.285.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tabalong	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	9 Lap	196.285.000	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tabalong	Jumlah Perangkat Daerah yang berhasil di usul ke penilaian ZI Nasional	3 PD	1.129.646.510	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tabalong	Jumlah Perangkat Daerah yang berhasil di usul ke penilaian ZI Nasional	3 PD	1.129.646.510	
		Nilai MCSP	96,5				Nilai MCSP	96,5		
		Persentase capaian dan ketepatan waktu pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN	100%				Persentase capaian dan ketepatan waktu pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN	100%		
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu	97,00%				Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu	97,00%		
		Persentase survey kepuasan layanan pendampingan dan QA	80%				Persentase survey kepuasan layanan pendampingan dan QA	80%		
		Persentase perumusan kebijakan Teknis dan Fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan	100%				Persentase perumusan kebijakan Teknis dan Fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan	100%		
		Persentase APIP yang memiliki sertifikasi sesuai ketentuan/kebutuhan	100%				Persentase APIP yang memiliki sertifikasi sesuai ketentuan/kebutuhan	100%		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tabalong	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang	60%	264.825.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tabalong	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan	60%	264.825.000	



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dilaksanakan								
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tabalong	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	10	72.325.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tabalong	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	10	72.325.000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tabalong	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	4	192.500.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tabalong	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	4	192.500.000	
Pendampingan dan Asistensi	Tabalong	Persentase Pendampingan dan Asistensi	100%	864.821.510	Pendampingan dan Asistensi	Tabalong	Persentase Pendampingan dan Asistensi	100%	864.821.510	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Tabalong	Jumlah PD yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	41 PD	179.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Tabalong	Jumlah PD yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	41 PD	179.000.000	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tabalong	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	10 Keg	213.901.800	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tabalong	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10 Keg	213.901.800	



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dan Pemberantasan Korupsi								
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Tabalong	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	41 PD	471.919.710	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Tabalong	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	41 PD	471.919.710	
JUMLAH PAGU ANGGARAN				24.936.604.774	JUMLAH PAGU ANGGARAN				26.581.874.700	

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Tabalong, 2025



2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tabalong melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong hanya lingkup Pembinaan dan Pengawasan Reguler (PKPT) serta pengembangan aparatur pengawasan sehingga usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung tidak ada. Akan tetapi masyarakat dapat mengajukan laporan pengaduan Masyarakat (wasmas) atas indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk di diadakan pemeriksaan tujuan tertentu/khusus/kasus.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

- a. Telaahan Renstra Inspektorat Daerah Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Visi RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari 8 (delapan) Misi Presiden atau disebut Asta Cita. Dimana dalam 8 Misi tersebut yang selaras dengan tujuan Inspektorat Daerah adalah pada Misi ke 7 yaitu **“Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan”**.

- b. Telaahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 adalah **“Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Menuju Babussalam”**, yang terdiri dari 8 (delapan) Misi, dimana Misi ke 3 yang selaras dengan tujuan Inspektorat adalah Mewujudkan Transformasi Tata Kelola (Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah **“Kalsel Bekerja Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera Menuju Gerbang Logistik Kalimantan”**, dengan 5 Misi RPJMD.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja sebagaimana tercantum dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029

3.2.1 Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah.



3.2.2 Sasaran

- a. Meningkatnya efektifitas pengawasan keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
- b. Meningkatkan Integritas, Kapabilitas APIP dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemerintah Daerah
- c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Prioritas dan sasaran Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut

:

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Inspektorat Daerah	Indikator Sasaran SKPD (outcome)
1	2	3	4	5	6
1	PD 4: Percepatan pertumbuhan ekonomi yang tangguh, berdaya saing dan inklusif.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih	Opini BPK (opini)	a. Meningkatnya efektifitas pengawasan keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Penurunan Temuan berulang Eksternal 2. Persentase Perangkat Daerah yang pengendalian Internalnya berkategori MEMADAI /Level 3 3. Persentase Perangkat Daerah berkategori SAKIP Minimal A
				b. Meningkatkan Integritas, Kapabilitas APIP dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemerintah Daerah	1. Nilai IEPK 2. Perangkat Daerah yang berhasil mendapat Predikat WBK/WBBM 3. Indeks Kapabilitas APIP
				c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	1. Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tabalong 2025-2029

Hubungan antara tujuan Inspektorat Daerah dengan sasaran Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2
Tujuan Inspektorat Daerah Tabalong

No	Tujuan Inspektorat Daerah	Indikator Tujuan Inspektorat Daerah	Target Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2027
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah.	Indeks Maturitas (Nilai) SPIP	3,2
		Nilai SPI	77,38

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tabalong 2025-2029

Tabel 3.3
Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong

Sasaran Inspektorat Daerah	Indikator Sasaran SKPD (<i>outcome</i>)	Target Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2027
5	6	
1. Meningkatkan efektifitas pengawasan keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Penurunan Temuan berulang Eksternal	1. 45 %
	2. Persentase Perangkat Daerah yang pengendalian Internalnya berkategori MEMADAI /Level 3	2. 80 %
	3. Persentase Perangkat Daerah berkategori SAKIP Minimal A	3. 40 %
2. Meningkatkan Integritas, Kapabilitas APIP dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemerintah Daerah	1. Nilai IEPK	1. 2,88
	2. Perangkat Daerah yang berhasil mendapat Predikat WBK/WBBM	2. 2 PD
	3. Indeks Kapabilitas APIP	3. 3.30
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	1. Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	1. A

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tabalong 2025-2029

Demikian juga menyangkut Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah tergambar dengan tabel berikut ini :



Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong 2027

Kinerja Utama Inspektorat Daerah	Indikator Sasaran SKPD (<i>outcome</i>)	Target Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2027
5	6	
1. Meningkatnya efektifitas pengawasan keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Penurunan Temuan berulang Eksternal 2. Persentase Perangkat Daerah yang pengendalian Internalnya berkategori MEMADAI /Level 3 3. Persentase Perangkat Daerah berkategori SAKIP Minimal A	1. 45 % 2. 80 % 3. 40 %
2. Meningkatkan Integritas, Kapabilitas APIP dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemerintah Daerah	1. Nilai IEPK 2. Peranagkat Daerah yang berhasil mendapat Predikat WBK/WBBM 3. Indeks Kapabilitas APIP	1. 2,88 2. 2 PD 3. 3.30
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	1. Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	1. BB

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tabalong 2025-2029

Adapun program Inspektorat Daerah pada tahun 2026 terdiri dari 3 program dan 10 kegiatan yang masuk dalam prioritas daerah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Sasaran, Program dan Subkegiatan Inspektorat Daerah
Kabupaten Tabalong

No	Sasaran SKPD	Nama Program / Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat



No	Sasaran SKPD	Nama Program / Kegiatan/Sub Kegiatan
		Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



No	Sasaran SKPD	Nama Program / Kegiatan/Sub Kegiatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.	a. Meningkatkan efektifitas pengawasan keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah b. Meningkatkan Integritas, Kapabilitas APIP dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
		Reviu Laporan Kinerja
		Reviu Laporan Keuangan
		Pengawasan Desa
		Kerja Sama Pengawasan Internal
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
		Pendampingan dan Asistensi
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Tabalong, 2025



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah kabupaten Tabalong Tahun 2026 adalah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dapat di lihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Faktor-Faktor Pertimbangan Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2026
INSPEKTORAT DAERAH Kabupaten Tabalong

Tema Pembangunan 2026	:	“Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik serta Infrastruktur Wilayah yang mendorong Investasi”
Isu-Isu Strategis Kabupaten Tabalong	:	1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data, evaluasi, dan keberlanjutan. 2. Kebutuhan kolaborasi antar daerah untuk sinergi kawasanPeningkatan Pelayanan Infrastruktur 3. Penguatan riset dan inovasi berbasis kebutuhan pembangunan daerah 4. Penguatan sistem informasi pembangunan daerah berbasis digital dan data serta spasial 5. Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan berbasis kinerja dan dampak
PRIORITAS DAERAH TAHUN 2026	:	1. Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dan berusaha; 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau; 3. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, religius dan berkarakter; 4. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang tangguh, berdaya saing dan inklusif; 5. Optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar serta konektivitas akses informasi; 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimaslisasi Reformasi Birokrasi;



	:	7. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana
ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026	:	1. Meningkatnya keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, akses lapangan kerja, menguatnya UMKM dan ekonomi lokal serta perlindungan, kolaborasi dan inklusi sosial; 2. Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses layanan kesehatan, terjangkau, promosi pencegahan serta memperkuat layanan kesehatan berbasis digital. 3. Meningkatnya akses, kualitas dan pemerataan pendidikan formal dan informal yang inovatif serta memperkuat pengembangan karakter dan nilai-nilai religius. 4. Meningkatnya diversifikasi dan infrastruktur ekonomi untuk mendorong daya saing, inklusifitas serta memperkuat inovasi dan teknologi. 5. Meningkatnya pemenuhan layanan infrastruktur dasar, konektivitas digital dan akses informasi dengan mengotimalkan pembangunan berbasis wilayah, kolaborasi dan kemitraan serta memperkuat monitoring dan evaluasi proyek infrastruktur 6. Meningkatnya digitalisasi pelayanan publik, memperkuat reformasi sistem birokrasi, pengembangan kompetensi aparatur, transparansi dan partisipasi publik serta memperkuat pengawasan untuk menjaga konsistensi pencapaian kinerja, dan 7. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penguatan mitigasi bencana
PROGRAM PRIORITAS DAERAH 2026		PROGRAM INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2026
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		1. 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	:	



	1. 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	2. 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2026 diawali dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong untuk selanjutnya ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029. Adapun prioritas daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dan berusaha;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau;
3. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, religius dan berakarakter;
4. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang tangguh, berdaya saing dan inklusif;
5. Optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar serta konektivitas akses informasi;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimaslisasi Reformasi Birokrasi;
7. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana

Adapun program Inspektorat Daerah pada tahun 2026 terdiri dari 3 program dan 10 kegiatan yang masuk dalam prioritas daerah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Sasaran, Program dan Subkegiatan Inspektorat Daerah
Kabupaten Tabalong

No	Sasaran SKPD	Nama Program / Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



No	Sasaran SKPD	Nama Program / Kegiatan/Sub Kegiatan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



No	Sasaran SKPD	Nama Program / Kegiatan/Sub Kegiatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.	a. Meningkatnya efektifitas pengawasan keuangan Pemda. b. Meningkatnya efektifitas pengawasan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah. c. Meningkatnya Integritas dan penurunan potensi Korupsi di Pemda. d. Meningkatnya kapabilitas APIP e. Meningkatnya kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
		Reviu Laporan Kinerja
		Reviu Laporan Keuangan
		Pengawasan Desa
		Kerja Sama Pengawasan Internal
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
		Pendampingan dan Asistensi
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Tabalong, 2025

Tabel 4.3
Keselarasan Program Inspektorat Daerah
dan Prioritas Daerah Tahun 2026

No.	Program Bappeda	Prioritas Daerah
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	



3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	optimaslisasi Reformasi Birokrasi;
---	--	---------------------------------------

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Tabalong, 2025

Adapun rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten
Tabalong secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AWAL RKPD/RENSTRA SKPD 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PENGAWASAN								
INSPEKTORAT DAERAH				26.581.874.700				28.762.917.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	Tabalong	81%	23.179.995.226	APBD		82%	25.081.913.800
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	Tabalong	100%	43.726.058	APBD		100%	130.363.746
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dok	20.254.058			4 Dok	35.938.762
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Penyesuaian Sub Kegiatan pada ke Sekretariatan pada Tahun 2027	1 Dok	4.030.164
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 Dok	4.030.164



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORA
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AWAL RKPD/RENSTRA SKPD 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1 Dok	4.855.164
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1 Dok	4.855.164
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6 Lap	23.472.000			6 Lap	43.472.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat					Penyesuaian Sub Kegiatan pada ke Sekretariat pada Tahun 2027	3 Lap	23.472.000
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						1 Dok	4.855.164



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORA
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AWAL RKPD/RENSTRA SKPD 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah						1 Data	4.855.164
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Tabalong	100%	14.243.030.000	APBD		100%	15.942.570.233
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		59 Org	14.243.030.000			59 Org	15.927.745.069
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD					Penyesuaian Sub Kegiatan pada ke Sekretariat pada Tahun 2027	60 Dok	5.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2 Lap	3.325.164
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan						12 Lap	6.000.000



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORA
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AWAL RKPD/RENSTRA SKPD 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) yang akurat lengkap dan mutakhir.	Tabalong			APBD		100%	7.525.164
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik pada SKPD					Penyesuaian Sub Kegiatan pada ke Sekretariat pada Tahun 2027	4 Dok	2.050.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						9 Lap	2.150.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						19 Lap	3.325.164
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	Tabalong	100%	5.306.534.000	APBD		100%	4.353.001.225
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					Penyesuaian Sub Kegiatan pada ke Sekretariat pada Tahun 2027	2 Paket	177.000.000



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORA
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AWAL RKPD/RENSTRA SKPD 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						21 Dok	4.500.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi		59 org	5.306.534.000			59 Org	516.501.225
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan					Penyesuaian Sub Kegiatan pada ke Sekretariat pada Tahun 2027	59 Org	1.180.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						59 Org	2.475.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase aktivitas administrasi umum yang difasilitasi	Tabalong	100%	1.342.726.937	APBD		100%	2.510.046.960
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		4 Paket	9.280.000			4 Paket	10.051.897
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		5 Paket	91.574.943			5 Paket	197.623.069



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORA
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AWAL RKPD/RENSTRA SKPD 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan					Penyesuaian Sub Kegiatan pada ke Sekretariat pada Tahun 2027	4 Paket	500.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barag Cetak dan Penggandaan yang disediakan		9 Paket	68.469.994			9 Paket	78.469.994
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan		5 Dok	9.000.000			5 Dok	9.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		375 Lap	1.164.402.000			425 Lap	1.564.402.000
Penatausahaan Arsip dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penyesuaian Sub Kegiatan pada ke Sekretariat pada Tahun 2027	12 Dok	150.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Tabalong	100%	1.006.269.926	APBD		100%	250.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		47 unit	1.006.269.926			10 unit	250.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Tabalong	100%	739.216.460	APBD		100%	778.216.460



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORA
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AWAL RKPD/RENSTRA SKPD 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat		8 Lap	8.500.000			8 Lap	8.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 Lap	101.800.000			12 Lap	110.800.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12 Lap	628.916.460			12 Lap	658.916.460
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Tabalong	100%	498.491.845	APBD		100%	1.110.190.012
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		37 Unit	356.200.000			37 Unit	495.828.212
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		93 unit	63.330.000			125 unit	185.400.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 Unit	78.961.845			1 Unit	350.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau					Penyesuaian Sub Kegiatan pada ke	1 unit	78.961.800



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORA
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AWAL RKPD/RENSTRA SKPD 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					Sekretariat pada Tahun 2027		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PKPT yang terlaksana sesuai dengan rencana dan tepat waktu	Tabalong	85%	2.272.232.964	APBD		86%	2.458.669.600
	Temuan Auditor Eksternal yang ditindaklanjuti (%)		89%				89,5%	
	Temuan Auditor Internal yang ditindaklanjuti (%)		86%				88,62%	
	Persentase Perangkat Daerah dengan Rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu keuangan yang ditindaklanjuti		60,00%				65%	
	Persentase Perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen resiko sesuai ketentuan		80%				85%	
	Persentase Rekomendasi hasil Evaluasi Internal AKIP yang ditindaklanjuti		100%				100%	
	Persentase Reviu Lkj Pemda dan dokumen perencanaan sesuai regulasi		100%				100%	



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORA
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AWAL RKPD/RENSTRA SKPD 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah dan Pemdes	Tabalong	100%	1.993.197.964	APBD		100%	2.156.739.788
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yg dilaksanakan		119 Lap	571.181.219			119 Lap	618.046.618
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja yang dilakukan		7 Lap	210.095.776			7 Lap	227.334.129
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		5 Lap	348.513.000			5 Lap	377.108.479
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang dilaksanakan		15 Lap	401.790.000			18 Lap	434.756.855
Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Kerja Sama Pengawasan Internal yang terbentuk		5 kesepakatan	102.850.000			5 kesepakatan	111.288.839
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP		55 Dok	358.767.969			55 Dok	388.204.868
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan ttujuan tertentu yang ditindaklanjuti	Tabalong	100%	279.035.000	APBD		100%	301.929.812



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORA
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AWAL RKPD/RENSTRA SKPD 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani		2 Lap	82.750.000			2 Lap	89.539.635
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		9 Lap	196.285.000			9 Lap	212.390.177
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah yang berhasil di usul ke penilaian ZI Nasional	Tabalong	2 PD	1.129.646.510	APBD		3 PD	1.222.334.000
	Nilai MCSP		96				96,5	
	Persentase capaian dan ketepatan waktu pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN		100%				100%	
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu		100%				100%	
	Persentase survey kepuasan layanan pendampingan dan QA		80%				82%	
	Persentase perumusan kebijakan Teknis dan Fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan		100%				96,5%	



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORA
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AWAL RKPD/RENSTRA SKPD 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase APIP yang memiliki sertifikasi sesuai ketentuan/kebutuhan		100%				100%	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang dilaksanakan	Tabalong	60%	264.825.000	APBD		65%	286.553.889
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun		10	72.325.000			12	78.259.265
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang disusun		4	192.500.000			5	208.294.624
Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi	Tabalong	100%	864.821.510	APBD		100%	935.780.111
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang dilalukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi		41 PD	179.000.000			41 PD	193.686.949
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		10 Keg	213.901.800			12 Keg	231.452.442



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORA
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AWAL RKPd/RENSTRA SKPD 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		41 PD	471.919.710			41 PD	510.640.720

BAB V

P E N U T U P

Rancangan akhir Rencana Kerja (Rancangan akhir Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rancangan akhir Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rancangan akhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Rancangan akhir Renja Inspektorat Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.
2. Penyusunan Rancangan akhir Renja Inspektorat Daerah ini berpedoman pada Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029, sehingga difokuskan pada upaya pencapaian seluruh target pada Renstra.
3. Penyusunan Rancangan akhir Renja Inspektorat Daerah ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Rancangan akhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Rancangan akhir Renja Inspektorat Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026.
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan

terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tabalong.

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rancangan akhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Rancangan akhir renja masih berproses sesuai tahapan renja, dan akan ada beberapa perubahan yang akan dilakukan, Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) masih dalam proses penyusunan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan akhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, dengan melibatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dan *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Tabalong.

Akhir kata, Semoga Rancangan akhir Rencana Kerja tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, September 2025
Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong



Diyanto, SE, MT, FRMP
Pembina Tk.1/IV-b
NIP. 197110132005011005